

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan kumuh baru apabila tidak ditangani secara intensif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.¹

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah.² Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis untuk menciptakan perubahan serta menciptakan masyarakat yang lebih baik.³

¹As'ari, Ruli dan Siti Fadjarani, *Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*. Jurnal Geografi, Vol. 15 No.1, (2018), h. 5

²Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pelajar, 2010), h.307

³ Todaro Michael. P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ed. 6, Cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 1998), h.57

berfokus dengan akses sosial dan kebutuhan masyarakat miskin. Kemudian pada 2015 atau masa transisi berganti menjadi P2KKP (program penanganan kawasan kumuh perkotaan), yang berfokus pada mewujudkan kualitas sarana, prasarana dan kualitas umum yang lebih baik dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan kawasan permukiman. Setelah itu pada tahun 2016-2021 berubah menjadi KOTAKU (kota tanpa kumuh) dengan fokus pada peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru.⁶

Permukiman kumuh yang ada di kota juga menjadi bagian dari permasalahan kemiskinan yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.⁷

Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil yang secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. Perkembangan kota merupakan suatu proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda yang dapat dicirikan dari penduduk yang makin bertambah dan makin padat, pembangunan-pembangunannya yang semakin rapat permukiman yang cenderung semakin luas, semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota.

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang di hadapi beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan bahkan di Kota Parepare. Perkembangan pembangunan di Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan

⁶Program KOTAKU, *Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa*.
<http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/Petunjuk%20pelaksanaan%20Program%20Kotaku%20Tingkat%20Kelurahan.pdf>. (diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 22.10)

⁷Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

populasi manusia yang semakin meningkat setiap tahunnya, serta para pendatang yang akhirnya menetap.

Kota Parepare memiliki jumlah populasi penduduk sebesar 177.651 jiwa, terdiri dari empat Kecamatan diantaranya Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat serta terdiri dari 22 Kelurahan.⁸ Salah satu kelurahan di Kota Parepare, yaitu Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung menjadi lokasi penerapan program Kotaku. Kelurahan tersebut menjadi lokasi penerapan program Kotaku karena kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga kebanyakan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya digorong-gorong akibatnya saluran air tersumbat dan terjadi banjir. Minimnya penerangan yang membuat masyarakat setempat atau orang yang ingin melewati kawasan tersebut merasa was-was juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh program Kotaku.

Keadaan di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare juga terbilang kumuh, karena menimbulkan bau, tercermarnya lingkungan sekitar oleh sampah. Keadaan tersebut menjadi alasan diterapkannya program Kotaku. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Kotaku yaitu: bangunan, jalan lingkungan, Drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pemngamanan kebakaran, ruang terbuka publik. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Sabbang, telah teridentifikasi bahwa kawasan ini merupakan permukiman kumuh yang terletak di RW 009. Hasil dari program Kotaku awalnya berjalan dengan sangat baik, mulai dari pengerjaannya yang mengikutsertakan masyarakat hingga hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 22.05)

sekitar. Fasilitas yang diberikan membuat RW 009 tidak lagi terlihat kumuh, misalnya saja tembok masyarakat yang warnanya diperbaharui dan membuat mural sehingga tidak terlihat kumuh, menambah lampu jalan pada setiap gang sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman.

Berkaitan dengan hal tersebut yang dapat dilakukan secara rutin oleh masyarakat untuk menjaga supaya lingkungan tidak kumuh dan segar adalah dengan melakukan pengelolaan sampah pribadi dan pemanfaatan lingkungan hidup. Namun yang ditemukan bahwa masyarakat merasa jalan yang biasa dilalui kini menjadi sempit, jalan tersebut juga memperkecil lahan untuk dijadikan parkir. Selain itu, masyarakat sudah merasa nyaman dengan melakukan pengelolaan sampah secara berbayar karena tidak lagi memikirkan dimana tempat pembuangan sampah akhir yang akan dituju dan bagaimana dampak lingkungan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Masyarakat memahami program Kotaku dan lingkungan hidup bahwa dengan pengelolaan lingkungan yang baik akan dapat memberikan kesenangan, kesegaran, kesejukan, keindahan, menjaga kesehatan, dan terjaganya kebersihan. Namun Sebagian yang terlihat masih ada saluran pembuangan air, limbah, dan sampah yang tidak pada tempatnya. Masalah sampah merupakan masalah yang selalu dialami oleh manusia di desa apa lagi di kota, sifat konsumerisme manusia dan gaya hidup modern yang serba praktis mendorong permasalahan sampah tidak akan habisnya dan akan berdampak pada pembanguana infrastruktur kotaku.

Dampak pembangunan berbasis infrastruktur tidak pernah terlepas dari society (masyarakat). Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan sampai keberlanjutan pembangunan infrastruktur KOTAKU (kota tanpa kumuh). Terlebih dampak pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup

kerja KOTAKU atau Kelurahan Ujung Sabbang. Maka dari itu sesuai dengan disiplin ilmu pengembangan masyarakat islam dengan adanya program ini maka masyarakat yang berada dalam lingkup kerja KOTAKU terberdayakan.

Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlu adanya penelitian tentang analisis dampak pembangunan berbasis infrastruktur program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas permukiman perkotaan. Terkhusus lagi pada dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari program ini yang akan menjadi objek analisis peneliti. Segala sesuatu akan berubah menjadi lebih baik atau buruk seiring berjalannya waktu, fasilitas-fasilitas yang telah dibangun tidak akan bertahan lama apabila kurangnya pemeliharaan dari masyarakat sekitar, seperti yang terjadi sekarang di RW 009 Kelurahan Ujung Sabbang Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare. Hasil pembangunan dari program Kotaku tidak lagi berjalan dengan baik Tentu ada berbagai alasan mengapa hal tersebut terjadi.

I.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan program pembangunan berbasis Infrastruktur KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana dampak program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana keberlanjutan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan berbasis Infrastruktur KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare
- 1.3.3 Untuk Mengetahui keberlanjutan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Tinjauan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare.

1.4.2 Tinjauan Praktis

Secara melalui penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya, terkait program Kotaku di kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare.